

MEKANISME PASAR, DEMOKRASI PERWAKILAN DAN KRISIS EKONOMI

Yuni Prihadi Utomo

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

The economic crisis that attacks Indonesia has yet to be solved even that several policies taken by the government to overcome the problem are not in accordance with the reform spirit and unpopular. In order that we can understand about the problem more well, then we need to reobserve the root of this economic crisis problem. This observation uses the view of capitalist economics theory with the discussion in the aspect of market mechanism and the democracy of delegation theory. In the discussion, it is mentioned that the capitalist economic system wishes to have a certain political system that allows the people's preference to the social welfare level to be optimal for itself which it is accommodated by their delegation in government. In reality, the commitment of the capitalist economic system is not the healthy democracy tradition system. Thus, the market mechanism does not yield an optimal solution for large people's welfare.

Keywords: *economic crisis, market mechanism, democracy, people's preference*

PENDAHULUAN

Semuanya mulai pada Juli 1997, setelah optimisme yang agak berlebihan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dalam selang waktu yang tidak terlalu lama setelah krisis moneter melanda Thailand, nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, kemudian menjalar dengan cepat menjadi krisis moneter dan perbankan. Krisis moneter dan perbankan melahirkan krisis kepercayaan, yang selanjutnya menimbulkan krisis sosial dan kemudian mempercepat terjadi

krisis politik, yang sebelumnya memang sudah panas. Pada gelombang II, krisis politik memperdalam dan mempertebal krisis moneter, krisis kepercayaan, dan krisis sosial, sehingga timbullah krisis ekonomi yang makin lama makin meluas dan mendalam. Kemudian krisis ekonomi ini memperkuat krisis yang lain dan begitu seterusnya sehingga terjadilah *vicious circle* krisis ganda yang bagaikan benang kusut (Umar dkk, 2000).

Pemerintahan Presiden Habibie adalah pemerintahan yang tidak begitu beruntung. Kesulitan yang menimpa pemerintahan Presiden Habibie bukan saja disebabkan krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi secara bersamaan, tetapi juga karena keduanya tidak bisa diatasi dalam ukuran skala prioritas (Umar dkk, 2000). Krisis politik barangkali yang justru terbesar dan terberat. Seperti kita ketahui bersama pemerintahan Habibie adalah disepakati hanya sebagai pemerintah transisi, yang dengan demikian kurang memiliki legitimasi dan legalitas. Apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah saat itu, para pengamat selalu lebih siap untuk mengkritisnya secara habis-habisan dan menilainya dengan “tinta merah”, kecuali tentu saja kebijakan untuk segera mempersiapkan dan mempercepat Pemilihan Umum dari yang terjadwal pada tahun 2003 menjadi 1999. Pemilu yang dengan jalan berliku, bahkan sempat diwarnai kerusuhan sosial di beberapa tempat, pada akhirnya mengnatarakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati menjadi Presiden dan Wakil Presiden, serta Amien Rais dan Akbar Tanjung masing-masing menjadi Ketua MPR dan Ketua DPR. Sebuah formasi pemerintahan yang konon dianggap memiliki legitimasi tinggi dan lumayan mewakili aspirasi reformasi yang dituntutkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapan menyeruak di tengah masyarakat bahwa pemerintahan baru ini akan mampu secara efisien dan efektif menyelesaikan krisis multidimensional yang dihadapi bangsa ini.

Kini, setahun sudah pemerintah Gus Dur dan Megawati memegang kendali kebijakan di negeri ini, tetapi krisis tak juga kunjung berlalu. Beberapa kebijakan yang diambil justru sangata tidak populer dan bertentangan dengan semangat reformasi, yang menghendaki adanya rasionalitas, transparansi serta keberpihakan yang jelas terhadap keadilan dan kepentingan rakyat banyak. Di titik ini menurut hemat penulis upaya peninjauan kembali terhadap akar masalah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia diperlukan lagi, guna menegaskan

beberapa hal penting yang pernah diungkap para pakar, dan mengungkapkan beberapa hal penting lain yang barangkali belum sempat diungkapkan.

Penulis berkeyakinan bahwa kaca mata pandang terbaik yang harus dipergunakan untuk melakukan hal ini adalah kaca mata pandang teori ekonomi kapitalis, yang sangat mendewakan mekanisme pasar. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa - meski seringkali diingkari - perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah merupakan sebuah perekonomian kapitalis. Itulah alasannya mengapa perekonomian Indonesia sering disebut kapitalisme malu-malu. Di satu sisi "wajah" perekonomian dirias dengan bedak dan gincu kapitalisme tetapi pada saat yang sama "mulutnya" nyinyir mengingkarinya.

MEKANISME PASAR: APAKAH SEGALANYA?

Musgrave (1984) menjelaskan bahwa sekalipun mekanisme pasar bekerja secara sempurna, mekanisme pasar hanya bisa menyelesaikan masalah dasar ekonomi - what, how dan for whom - sampai pada tingkat efisien saja. Mekanisme pasar tidak dan tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah dasar ekonomi hingga dicapai "keadilan", dalam pengertian tercapainya suatu distribusi pendapatan yang relatif merata yang dapat mendorong tercapainya analisis ekonomi hampir selalu dianggap sebagai tertentu, dengan begitu bisa saja mekanisme pasar sampai pada solusi yang efisien tetapi tidak adil sama sekali. Mannan (1984) mengemukakan bahwa mekanisme pasar sering berubah menjadi rezim *permintaan efektif* yang dalam mengalokasikan barang dan jasa sangat bertentangan *kebutuhan efektif* dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena permintaan efektif yang menggerakkan mekanisme pasar yang kebetulan memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat. Kualitas solusi dari mekanisme pasar dengan demikian sangat ditentukan oleh "kelayakan" dari distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Sebagai konsekuensinya pemerintah suatu perekonomian kapitalis "wajib" melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi agar tercapai distribusi pendapatan sedemikian rupa sehingga solusi yang tercapai melalui mekanisme pasar adalah juga merupakan solusi yang optimal bagi kesejahteraan umum. Tanpa intervensi ini mekanisme pasar niscaya menjadi kancah pertarungan kekuatan pelaku ekonomi di mana di dalamnya yang

berlaku adalah hukum rimba ekonomi – *survival of the best fittest*. Pemenang hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi 1988, Maurice Allais, misalnya menyatakan (Ormerod, 1998), “Tidak betul bahwa perdagangan bebas menguntungkan dalam keadaan yang sangat khusus, yakni jika tingkat perekonomian pihak yang terlibat kurang lebih sama.” Logika yang sama tentu saja terjadi pada perdagangan bebas lokal. Perdagangan bebas, yang dalam wacana teoritis disebut sebagai Pasar Persaingan Sempurna, adalah suatu bentuk pasar ideal yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi kapitalis, yang di dalamnya mekanisme pasar dibiarkan bekerja tanpa halangan apapun.

Mekanisme pasar sendiri sebenarnya juga memiliki cacat bawaan, yakni hanya dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah *what*, *how*, dan *for whom* untuk barang swasta murni. Itu saja masih dengan dibayang-bayangi dengan risiko kegagalan pasar, baik karena adanya monopoli, eksternalitas ataupun faktor-faktor lain. Kegagalan pasar bisa menyebabkan terjadi inefisiensi dan kerugian sosial dalam perekonomian dan karenanya juga menjadi alasan masuk akal bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan di dalam kegiatan ekonomi. Pada barang publik murni, mekanisme pasar sama sekali tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah *what*, *how* dan *for whom*. Di sini pemerintah harus aktif untuk secara langsung menyelesaikan ketiga masalah tersebut.

Musgrave dengan Analisis Model Umum menunjukkan bahwa upaya untuk menyediakan baik untuk barang swasta murni melalui mekanisme pasar maupun barang publik secara langsung oleh pemerintah pada ujungnya akan sampai pada persoalan pemilihan distribusi pendapatan (barang dan jasa) yang “baik”. Pemilihan satu bentuk distribusi pendapatan yang “baik” harus dilakukan dengan mendasarkan pilihan pada suatu fungsi kesejahteraan sosial, yang hakekatnya mengekspresikan urutan mengenai nilai relatif dari berbagai tingkat kesejahteraan yang dialami oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat tentu saja berkeinginan untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial yang maksimum. Adalah menarik bahwa meskipun ilmu ekonomi mampu menjelaskan fenomena ini secara grafik maupun dalam bentuk fungsi-fungsi matematis, ilmu ekonomi mengakui bahwa dalam prakteknya fungsi kesejahteraan sosial adalah dibentuk melalui proses politik. Oleh karena itu dihajatkan oleh sistem ekonomi kapitalis suatu sistem politik yang memungkinkan preferensi masyara-

kat akan suatu tingkat kesejahteraan sosial yang optimal bagi dirinya dapat tetap terakomodasi dalam pilihan publik (*public choice*) yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di pemerintahan dalam bentuk pemilihan terhadap berbagai kebijakan baik ekonomi maupun non ekonomi.

TEORI DEMOKRASI PERWAKILAN: MENUJU PEMAHAMAN SEPENUHNYA

Demokrasi dan demokratisasi merupakan dua buah kata yang paling sering dilontarkan dan disepakati oleh hampir semua pakar bahkan awam sebagai syarat mutlak bagi penyelesaian krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ini tidak mengherankan sebab dalam ilmu ekonomi pun sistem demokrasi perwakilanlah yang sebenarnya disepakati sebagai sistem politik paling bonafide untuk menjamin tetap terakomodasinya preferensi masyarakat akan suatu tingkat kesejahteraan sosial yang optimal bagi dirinya dalam pilihan publik yang dilakukan wakil-wakilnya di pemerintahan. Kenyataan memperlihatkan bahwa di hampir semua negara kapitalis demokratisasi selalu menjadi imperatif. Namun demikian persoalannya tidaklah sederhana, demokrasi dan demokratisasi membawa kepada konsekuensi perubahan sikap yang radikal pada sikap politik masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dengan mereka yang dipimpin.

Merujuk pada model yang dikemukakan oleh Schumpeter dan Downs (lihat Guritno, 1999), sistem demokrasi perwakilan pada hakekatnya didasarkan pada suatu asumsi bahwa masyarakat dan wakil-wakil rakyat bertindak secara rasional yang didasarkan pada kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tujuan para politisi atau wakil-wakil rakyat adalah mempertahankan kedudukan mereka. Ini dapat dilakukan apabila mereka menyuarakan kehendak masyarakat yang mereka wakili. Jadi disuarakannya kepentingan rakyat pada dasarnya tidak didasari oleh pertimbangan moralitas tetapi didasari oleh tujuan untuk memaksimalkan perolehan suara. Di sisi lain tujuan masyarakat tentu saja adalah memaksimalkan manfaat yang diterimanya dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masyarakat dalam hal ini tentu saja akan memilih wakil-wakil yang merupakan orang-

orang yang bersedia untuk mengakomodasi keinginan-keinginan mereka.

Dari model Schumpeter dan Downs, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya tujuan untuk memikirkan kepentingan diri masing-masing individu adalah yang sebenarnya menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah merupakan kebijakan-kebijakan yang paling diinginkan masyarakat, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan pilihan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut, tetapi melalui wakil-wakil mereka.

TEORI DEMOKRASI PERWAKILAN: IMPLIKASI

Rasionalitas adalah kunci utama dalam sistem demokrasi perwakilan. Sementara itu karakteristik dan kualitas dari rasionalitas masyarakat tentu saja sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mayoritas masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka mereka akan semakin cerdas dalam mempersepsikan dan mengekspresikan preferensi-preferensinya di segala bidang – peningkatan kualitas rasionalitas masyarakat. Adanya peningkatan kualitas rasionalitas ini selanjutnya akan membuat masyarakat semakin tidak bisa ditipu oleh hal-hal yang tidak memiliki argumentasi ilmiah rasional yang memadai. Masyarakat akan menjadi kritis terhadap siapapun bahkan terhadap wakil rakyat atau pemimpin yang dipilihnya sendiri. Pada saatnya tidak ada lagi yang dinamakan dukungan “membabi-butu”, yang ada adalah pertanyaan-pertanyaan kritis evaluatif, “Benarkah anda tengah mengakomodasikan kepentingan-kepentingan kami dalam kebijakan-kebijakan yang anda pilih? Jika tidak... rasanya anda perlu berubah atau bila enggan berubah... turun!. Pendidikan dalam arti luas dan khususnya pendidikan politik untuk masyarakat dengan demikian harus menjadi prioritas dan sekaligus menjadi elemen terpenting pertama dalam proses demokratisasi.

Setelah pendidikan, sistem Pemilu yang baik adalah elemen terpenting yang kedua. Sistem Pemilu harus memungkinkan kekuatan memilih tetap ada di tangan masyarakat luas, dengan pemberian suara yang terjamin tetap didasari oleh rasionalitas. Sistem ini oleh karena itu harus mampu meminimalkan kemungkinan dilakukannya tindakan-tindakan oleh calon wakil rakyat atau partai politik yang bertujuan untuk menciptakan ilusi-ilusi menyesatkan terhadap calon pemilih,

khususnya berkaitan dengan program-program yang ditawarkan, ataupun tindakan-tindakan yang dapat menggiring mereka untuk memilih partainya dengan melepas pertimbangan rasional karena suatu kompensasi tertentu. Sistem kampanye haruslah dirancang untuk lebih berorientasi pada bentuk-bentuk yang memungkinkan program-program partai yang dikandidatkan oleh partainya untuk menduduki jabatan-jabatan puncak di hadapan publik secara luas. Ini penting sebab apabila kekuatan memilih hanya berada di tangan segelintir orang atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang dalam wacana sosiologis sering disebut sebagai kelompok strategis, maka kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pastilah hanya akan melayani kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu tersebut. Apabila masyarakat memilih dalam keadaan “terilusi” atau kehilangan pertimbangan rasionalnya, maka pada hakekatnya dia telah tidak memilih sesuai dengan kepentingannya. Apabila tokoh-tokoh partai yang dikandidatkan oleh partainya untuk menduduki jabatan-jabatan puncak tidak pernah tampil di hadapan publik secara luas untuk memperlihatkan “ketrampilannya” dalam menghadapi simulasi berbagai masalah dan situasi lewat acara-acara evaluatif-interaktif, masyarakat menghadapi risiko mengamanatkan kepentingannya pada orang yang sebenarnya kurang mampu.

Elemen terpenting ketiga adalah adanya iklim politik yang memungkinkan kelompok penekan – baik lembaga, kelompok ataupun perorangan – dalam masyarakat dapat melontarkan kritik-kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk yang lebih bervariasi secara bebas dan nyaman. Ini tentu saja mensyaratkan minimalisasi pendekatan keamanan atau minimalisasi peran sektor pertahanan dalam kehidupan idepoleksosbud masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam penanganan gerakan-gerakan massa yang bersifat sosial dan politik. Di samping itu mutlak perlu adanya sistem pembagian dan pelaksanaan tugas dalam dan antar lembaga-lembaga tertinggi negara yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan pengambilan keputusan yang bersifat korektif secara luwes dan cepat. Adalah ironis bahwa elemen terpenting ketiga ini justru seringkali disalahpersepsikan oleh sebagian besar birokrat kita sebagai pintu yang terbuka lebar bagi terjadinya kekacauan sosial di dalam masyarakat. Salah persepsi ini mengakibatkan mereka menjadi sangat lamban dalam merealisasikan elemen penting ini. Tampaknya kurang disadari bahwa kekacauan

sosial justru lebih sering terjadi karena “rasa putus asa massa” sebagai akibat masyarakat merasa aspirasinya tidak bisa disalurkan atau kalau-pun dapat tersalurkan, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Padahal realisasi dari elemen terpenting ketiga ini justru merupakan solusi efektif bagi potensi kekacauan sosial yang meninggi.

REALITAS DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA

Untuk memahami realitas sistem demokrasi perwakilan di Indonesia tidaklah diperlukan alat analisis ataupun perangkat teori yang canggih. Satu slogan yang marak muncul dalam setiap momen kampanye cukuplah untuk menggambarkan kualitas demokrasi kita. Slogan itu adalah “Pejah gesang nderek...” atau dalam bahasa Indonesia “Mati hidup ikut ...” Titik-titik biasanya diisi dengan nama partai politik atau tokoh utama partai politik. Slogan ini tidaklah bisa dimaknai lain kecuali bahwa telah terjadi kematian rasionalitas dalam sikap politik masyarakat melalui sakralisasi partai politik atau partai politik.

Artian ini bisa saja dianggap merupakan simplifikasi yang keterlaluan dan tentu dapat diperdebatkan, tetapi yang jelas slogan-slogan senada banyak bertebaran di arena kampanye, yang umumnya juga lebih banyak tampil sebagai arak-arakan massa yang tertekan dan karenanya membutuhkan semacam pelepasan psikologis; kampanye yang justru menciptakan rasa tak aman di kalangan masyarakat. Jika dengan fakta ini, artian di muka tetap diingkari masih terdapat banyak fenomena yang akan mendukungnya. Salah satunya bisa dilihat bagaimana partai-partai mempersiapkan para bakal calon-nya untuk menduduki jabatan wakil rakyat, “adakah mekanisme yang sehat sehingga kader-kader atau SDM terbaik yang terpilih?” Pemberian suara oleh masyarakat pun kenyataannya didasari oleh fanatisme kepartaian yang umumnya sudah *built in* sejak awal dan bukan pemahaman yang jernih mengenai siapa yang sebenarnya sedang mereka pilih untuk mewakili mereka di MPR, DPR dan DPRD, dan bagaimana kemampuannya. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat adalah memberikan suaranya dengan berbekal pemahaman terhadap gambar partainya dan bukan yang lainnya.

Tidak mengherankan bahwa ketika semua prosesi kampanye selesai, kemenangan diraih dan formasi eksekutif pemerintahan negara

dibentuk, dengan segera muncul berbagai perilaku rent seeking di kalangan orang partai yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang didorong *vested interest*. Anehnya perilaku semacam itu bagi partai seakan justru dipandang sebagai “kelaziman” sehingga mendapat pembelaan yang luar biasa. Pernyataan lisan dan tulisan di media massa serta “pengarahan-pengarahan” yang disampaikan di forum-forum simpul massa yang kadang kurang kritis dan evaluatif ramai digunakan untuk mengekspresikan pembelaan tersebut, terkadang bahkan dibumbui dengan ancaman-ancaman pengerahan massa yang menjadikan bayangan akan terjadinya kerusuhan sosial menjadi sangat jelas di benak siapapun. Di forum rapat dan sidang lembaga MPR dan DPR yang seharusnya menjadi tempat di mana kepentingan publik paling terlindungi pun, pembelaan yang berbau fanatisme kepartaian sering marak. Penyakit “merasa mewakili” membuat kader partai yang menduduki posisi penting baik di lembaga permusyawaratan rakyat dan pemerintahan seringkali menganggap bahwa apa yang sedang dipikirkan dan dilakukannya otomatis adalah kehendak rakyat. Akibat dari semua kondisi tersebut adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dipilih menjadi tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi bertentangan dengan kebutuhan efektif dari sebagian besar masyarakat, mekanisme pasar berubah menjadi medium yang sempurna bagi pelaku ekonomi kuat dan kroni-kroninya untuk menguasai sektor-sektor ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi kerakyatan menjadi bangunan indah di awang-awang, yang diceritakan sebagai wacana-wacana dari satu forum diskusi ke forum diskusi yang lain. Setelah itu... tidak ada yang berubah, kecuali barangkali keadaan menjadi bertambah runyam.

AKAR KRISIS DAN SOLUSINYA

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat dipandang sebagai disebabkan oleh dilaksanakan sistem ekonomi kapitalis pada medium yang salah, yakni masyarakat tanpa sistem dan tradisi demokrasi yang sehat. Hal ini menyebabkan mekanisme pasar yang berjalan paling sempurna sekali pun tidak akan menghasilkan solusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Padahal bukti-bukti empirik sendiri memperlihatkan bahwa di berbagai sektor eko-

nomi mekanisme pasar pada kenyataannya telah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena struktur pasar terlanjur menjadi oligopolis dan monopolis, yang jauh dari tingkat efisiensi ekonomi yang sebenarnya. Ini tentu saja sangat memperparah keadaan. Tanpa sistem dan tradisi demokrasi yang kuat dan sehat tidak mungkin sistem ekonomi kapitalis memperoleh koreksi-koreksi yang radikal guna mencegah dampak-dampak buruk yang ditimbulkannya.

Pemahaman terhadap akar krisis ekonomi ini sekaligus membawa kita pada pemahaman mengenai langkah-langkah penting yang harus dilakukan guna mengatasi krisis ekonomi paling berkepanjangan dibanding dengan yang dialami negara-negara lain di Asia, yakni membangun demokrasi kita. Ini sebenarnya sudah sering ditekankan dan disepakati oleh berbagai pihak, sayang dalam implementasinya justru kurang mendapat dukungan. Kurangnya dukungan terlihat dari masih sering disembunyikan kriteria obyektif-rasional dalam membahas dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini ketika diketahui bahwa masalah bersangkutan ternyata melibatkan "rekan-rekan sendiri".

Adakah kesemuanya itu suatu kebenaran? Untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jawabnya tentu saja bukan, PEJAH GESANG NDEREK...SAMPEAN."

DAFTAR PUSTAKA

- Mannan, M.A (1984). *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*, Jedah Saudi Arabia: International Center for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, (1984), *Public Finance in Theory and Practice*, Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Umar Basalim, Moch Rum Alim dan Helma Oesman, (2000). *Perekonomian Indonesia: Krisis dan Strategi Alternatif*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Ormerod, Paul, (1998). *Matinya Ilmu Ekonomi*, penyadur Parakitri T. Simbolon, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).